

ISSN 1412-9302

HALAQA

JURNAL KEPENDIDIKAN DAN KEISLAMAN

1. **Peran Sosial Pesantren dalam Pemberdayaan Masyarakat**
Akhtim Wahyuni
2. **Problematika Studi Agama Kontemporer: Perspektif Pemikiran Abu-L-Hasan Al-'Amiri**
Eko Asmanto
3. **Perkembangan Hukum Islam di Mesir: Dari Masa Klasik hingga Modern**
Nur Lailatul Musyafa'ah
4. **Dinamika Pendidikan Islam: Studi Perubahan Kelembagaan dan Metodologi pada Madrasah Model**
M. Musfiqon
5. **Konsep Pendidikan Anak Usia Dini**
Ida Rindaningsih
6. **Negara, Ideologi, dan Pendidikan dalam Pandangan Antonio Gramsci dan Louis Althusser**
Isa Anshori
7. **Motivisme Peningkatan Pengajaran Perguruan Tinggi Islam**
Ainun Nadlif
8. **Manajemen Kesiswaan yang Efektif**
Ummi Shoidah
9. **Pengembangan Model Akselerasi Pembelajaran Bahasa Arab pada *Maharah Allstima'* dan *Al-Kalam* dengan Metode *Mubasyarah* dan *Sam'iyah Syafahiyah***
Khoirul Huda

PUSAT STUDI PENGEMBANGAN PENDIDIKAN
FAKULTAS TARBIYAH, KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SIDOARJO

HALAQA
JURNAL KEPENDIDIKAN DAN KEISLAMAN
Vol. 8 No. 1, April 2009

Halaqa adalah jurnal Kependidikan dan Keislaman, PSPP (Pusat Studi Pengembangan Pendidikan) Fakultas Tarbiyah, Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, yang menyampaikan hasil-hasil penelitian, artikel konseptual (non-penelitian atau hasil pemikiran), *review* buku baru dan obituari di bidang Kependidikan (meliputi: Psikologi, Sosiologi Pendidikan, Kurikulum dan Falsafah Pendidikan), serta bidang Keislaman (meliputi: Teologi, Syariah, sejarah dan Pemikiran).

Terbit pertama kali tahun 2002

Ketua Editor:
HM Musfiqon

Wakil Ketua
Khoirul Huda

Sekretaris
Nyong ETIS

Editor Ahli

Achmad Jainuri (IAIN Sunan Ampel Surabaya)

H. Syafiq A. Mughni (IAIN Sunan Ampel Surabaya)

A. Malik Fajar (IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta)

Muchlas Samani (Universitas Negeri Surabaya)

Abu Sufyan (IAIN Sunan Ampel Surabaya)

Editor

Isa

Muhammad

Istikomah

Najih Anwar

Ainun Nadlif

Staf Administrasi

Ida Rindaningsih

Diterbitkan Oleh:

Pusat Studi Pengembangan Pendidikan (PSPP)
Fakultas Tarbiyah, Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Alamat Editor:

Jl. Mojopahit No. 666B Sidoarjo Jawa Timur, Indonesia
Telp/Fax. 031 - 8945444 / 031 - 8949333

E-mail: tarbiyah@umsida.ac.id

Website: www.umsida.ac.id

NEGARA, IDEOLOGI, DAN PENDIDIKAN DALAM PANDANGAN ANTONIO GRAMSCI DAN LOUIS ALTHUSSER

Isa Anshori

Dosen dan Dekan Fakultas Tarbiyah Universitas Muhammadiyah Sidoarjo,
Jl. Mojopahit No. 666 B Sidoarjo; Telp. (031) 8945444; Fax. (031) 8949333;
Email: tarbiyah@umsida.ac.id.

ABSTRACT

Antonio Gramsci and Louis Althusser both see state as a power institution, ideology and education as means of power. But, Gramsci sees mastery upon state through "hegemony" i.e. domestication by idea, value, thought, and as it. Meanwhile, Althusser sees mastery upon state through mechanism of "repressive" and "ideological". Interrelation between both can be seen in procedure of RSA and ISA as what proposed by Althusser. Hegemony works through the logic of ideological state apparatus (ISA) and repressive state apparatus (RSA). Gramsci sees education as one of the organizing tools for hegemony, such the things of Althusser who sees education as the most effective ideological state apparatus to carry on state functions.

Key words: state, ideology, education.

ABSTRAK

Antonio Gramsci dan Louis Althusser melihat negara sebagai institusi kekuasaan, ideologi dan pendidikan sebagai alat kekuasaan. Bedanya, Gramsci melihat penguasaan negara melalui "hegemoni", yakni penundukan melalui ide, nilai, pemikiran, dan sebagainya. Sedangkan Althusser melihat penguasaan negara melalui mekanisme "represif" dan "ideologis". Hubungan keduanya bisa dilihat pada cara kerja RCA dan ISA sebagaimana yang dikemukakan oleh Althusser. Hegemoni berjalan melalui logika perangkat Negara ideologis (ISA) dan perangkat negara represif (RSA). Gramsci melihat pendidikan sebagai salah satu alat organisir bagi hegemoni, demikian halnya Althusser melihat pendidikan sebagai perangkat negara yang ideologis (ISA) yang paling efektif untuk melaksanakan fungsi negara.

Kata-kata kunci: negara, ideologi, pendidikan.

PENDAHULUAN

Antonio Gramsci dan Louis Althusser merupakan dua tokoh yang sama-sama Marxis. Gramsci dikenal dengan logika "Hegemoni", sedangkan Louis Althusser dikenal dengan "tindakan represif", yakni melalui RSA dan ISA. Pandangan-pandangannya terhadap negara.

ideologi dan pendidikan terkesan kontroversial, apalagi bagi mereka yang terbiasa dengan kemapanan. Bagaimana kedua tokoh ini menyoroti negara, ideologi dan pendidikan? Bagaimana keterkaitan antara teori Gramsci dengan Louis Althusser? Bagaimana mereka secara khusus melihat pendidikan? Paparan berikut mencoba menjawab permasalahan tersebut.

PEMBAHASAN

Antonio Gramsci

Gramsci, adalah seorang Marxis yang memformulasikan bagaimana logika hegemoni berjalan. Menurutnya, untuk melakukan penundukan terhadap warganya, negara tidak perlu menggunakan kekerasan fisik. Jika menggunakan kekerasan fisik, maka kategori itu masuk dalam dominasi. Menurut Gramsci, Hegemoni didefinisikan sebagai kepemimpinan budaya yang dijalankan oleh kelas yang berkuasa. Ia mempertentangkan hegemoni dengan "koersi" yang dijalankan oleh kekuasaan legislatif atau eksekutif atau diekspresikan melalui campur tangan polisi.¹

Hegemoni sendiri ia definisikan pada penundukan melalui ide, nilai, pemikiran, dan sebagainya. Sehingga, apa yang Gramsci maksud dengan hegemoni menunjuk pada konsep penundukan pada pangkal *state of mind* seseorang atau warga negara. Atau dalam titik awal pandangannya bahwa suatu kelas dan anggotanya menjalankan kekuasaan terhadap kelas-kelas di bawahnya dengan cara kekerasan dan persuasi.² Pada titik itu, atas nama keamanan dan ketertiban, negara mengambil "simpati" alih-alih penundukan warga secara *coercion* sekaligus *consensus*. Dimana warga diharapkan secara sukarela dan terpaksa mengikuti kemauan negara. Tentunya *political impact* yang akan lahir adalah negara sedang mengintervensi secara absah, dengan persetujuan warganya. Sedangkan warga, menilai sebagai budi baik negara terhadap penjagaan keamanan dan ketertiban lingkungan.

Menurut Gramsci, hegemoni adalah penindasan atau dominasi melalui ideologi atau budaya.³ Hegemoni, bagi Gramsci, menjelaskan mengapa suatu kelompok atau kelas secara sukarela atau dengan konsensus mau menundukkan diri pada kelompok atau kelas yang lain. Cara hegemoni bisa ditempuh melalui dua jalan yaitu: *Pertama*, "consent" yaitu kepatuhan, persetujuan, sukarela. Bentuknya melalui masjid, juru dakwah, koran, televisi, dan radio, yang semuanya membela kepentingan negara untuk mempengaruhi atau menghegemoni *civil society*. *Kedua*, "coercion" yakni penindasan, bentuknya melalui seperti kekuasaan tentara, keamanan atau hukum (pengadilan) dan universitas.⁴ Menurut Gramsci, proses hegemoni seringkali justru menyangkut perebutan pengaruh konsep realitas, dari pandangan mereka yang mendominasi

¹ George Ritzer & Douglas J. Goodman, Teori Sosiologi dari Teori Sosiologi Klasik sampai perkembangan Mutakhir Teori Sosial Postmoderen, ter. Nurhadi (Yogyakarta: Kreasi Wacana, cet pertama, Agustus 2008), 300.

² Roger Simon, Gagasan-gagasan Politik Gramsci (Yogyakarta: INSIST bekerjasama dengan Pustaka Pelajar, 2000), 19.

³ Budairi dalam tulisan, Mansour Fakhri, Jalan Lain: Manifesto Intelektual Organik (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), 120.

⁴ Ibid., 120.



telah diambil alih secara sukarela oleh yang didominasi. Sehingga akibatnya proses hegemoni akan sangat mempengaruhi kehidupan sosial dan pribadi mereka yang dihegemoni, bahkan berpengaruh pada cita rasa, moralitas, prinsip keagamaan, dan intelektual mereka.⁵

Teori hegemoni Gramsci merupakan sebuah teori politik paling penting abad XX. Teori ini dibangun di atas premis pentingnya ide dan tidak mencukupinya kekuatan fisik belaka dalam kontrol sosial politik. Di mata Gramsci, agar yang dikuasai mematuhi penguasa, yang dikuasai tidak hanya harus merasa mempunyai dan menginternalisasi nilai-nilai serta norma penguasa, lebih dari itu mereka juga harus memberi persetujuan atas subordinasi mereka. Inilah yang dimaksud Gramsci dengan "hegemoni" atau menguasai dengan "kepemimpinan moral dan intelektual" secara konsensual.⁶

Gramsci membagi keberadaan hegemoni dalam dua wilayah superstruktur, yaitu masyarakat sipil dan masyarakat politik atau negara. Dalam kamus marxis ortodox bahwa basic struktur pasti akan mempengaruhi super struktur. Inilah yang kemudian ditolak Gramsci. Gramsci melihat arti penting "ruh" dan "ide" seperti halnya dalam filsafat Hegel dalam mempengaruhi kesadaran manusia dalam wilayah super struktur yang ternyata mampu mempertahankan bentuk basic struktur.

Kapitalisme dapat bertahan karena kaum borjuis mampu membangun dan mempertahankan hegemoninya terhadap kelas pekerja. Sedangkan kaum intelektual proletariat (partai, fungsi partai adalah mengintegrasikan intelektual secara massal) yang memiliki wilayah hegemoni bagi kelas pekerja ternyata gagal menggerakkan kelas pekerja untuk melakukan perjuangan kelas dan revolusi. Ini akibat direduksinya pemikiran Karl Marx menjadi bentuk Darwinisme dan Determinisme, yang percaya akan keruntuhan kapitalisme dan keniscayaan revolusi akan terjadi dengan sendirinya dalam sebuah "hukum besi sejarah". Serta meletakkan kesadaran dan strategi perjuangan pada perspektif determinan ekonomi. Hal ini didasarkan atas filsafat Materialisme Dialektika Historis, yang melihat bahwa sejarah dan perkembangan masyarakat ditentukan oleh alat produksi yang kemudian disebut sebagai *basic structure* sebagai bagian bawah yang mempengaruhi bangunan atas atau *super structure* (negara, moral, ideologi, politik).

Di sini kemudian Gramsci melihat arti penting intelektual sebagai alat organisir bagi hegemoni. Bagaimana hegemoni diciptakan, agar resistensi rakyat terhadap kelompok dominan dapat diminimalisir? Bagi Gramsci titik tolak pembangunan hegemoni adalah konsensus, penerimaan konsensus ini bagi proletariat dilakukan dengan persetujuan dan kesadaran, namun hal itu bisa terjadi bagi Gramsci lebih dikarenakan kurangnya basis konseptual yang dimiliki kelas pekerja sehingga permasalahan sesungguhnya bisa dimanipulasi. Ada dua hal mendasar menurut Gramsci yang menjadi biang keladinya, yaitu *pendidikan* di satu pihak dan *mekanisme kelembagaan* di lain pihak. Untuk itu Gramsci mengatakan bahwa pendidikan yang ada tidak pernah menyediakan kemungkinan bangkitnya kemampuan untuk berpikir secara kritis dan sistematis bagi kaum buruh. Di lain pihak, mekanisme kelembagaan (sekolah, gereja, parpol, media massa dan sebagainya) menjadi "tangan-tangan" kelompok yang berkuasa untuk menentukan ideologi yang mendominasi. Bahasa menjadi sarana penting untuk melayani fungsi hegemonik. Konflik sosial yang ada dibatasi baik intensitas maupun ruang lingkungannya, karena

⁵ Ibid, 145.

⁶ Muhadi Sugiono, Kritik Antonio Gramsci Terhadap Pembangunan Dunia Ketiga (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), 30-31.

Negara, Ideologi, dan Pendidikan dalam Pandangan...

ideologi yang ada membentuk keinginan-keinginan, nilai-nilai dan harapan menurut sistem yang telah ditentukan.

Ada tiga tingkat hegemoni menurut Gramsci yang diungkapkan Josep Femia. Pertama, *hegemoni integral*, ditandai dengan afiliasi massa yang mendekati totalitas. Masyarakat menunjukkan tingkat kesatuan moral dan intelektual yang kokoh. Ini tampak dalam hubungan organis antara pemerintah dengan yang diperintah. Hubungan tersebut tidak diliputi dengan kontradiksi dan antagonisme baik secara sosial maupun etis. Contohnya, Perancis sesudah revolusi (1879). Kedua, hegemoni yang merosot (*decadent hegemony*). Dalam masyarakat kapitalis modern, dominasi ekonomis borjuis menghadapi tantangan berat. Dia menunjukkan adanya potensi disintegrasi di sana. Dengan sifat potensial ini dimaksudkan bahwa disintegrasi itu tampak dalam konflik yang tersembunyi "di bawah permukaan kenyataan sosial". Artinya, sekalipun sistem yang ada telah mencapai kebutuhan atau sarannya, namun pemikiran yang dominan dari subyek hegemoni. Karena itu, integrasi budaya maupun politik mudah runtuh. Ketiga, hegemoni bersandar pada kesatuan ideologis antara elit ekonomis, politis, dan intelektual yang berlangsung bersamaan dengan keengganan terhadap setiap campur tangan massa dalam hidup bernegara. Dengan demikian, kelompok-kelompok hegemonis tidak mau menyesuaikan dengan kepentingan dan aspirasi-aspirasi mereka dengan kelas lain dalam masyarakat. Mereka malah mempertahankan peraturan melalui transformasi penyatuan para pemimpin budaya, politik, sosial maupun ekonomi yang secara potensial bertentangan dengan "negara baru" yang dicita-citakan oleh kelompok hegemonis itu.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Althusser berbeda dengan Gramsci. Menurut Althusser, untuk melakukan penundukan terhadap warganya, negara perlu menggunakan tindakan represif (kekerasan fisik) dan ideologis. Althusser dalam memahami politik tidak hanya sekedar suatu bentuk dogmatika, melainkan praktek empiris yang nyata kita temukan dalam kehidupan negara. Pandangannya tentang negara, sebagaimana ada dalam Manifesto Komunis dan *Eighteen Baumeire*, Althusser cenderung memandang negara sebagai perangkat penindasan. Dengan demikian, negara yang dibangun atas dasar kekuasaan yang ada padanya merupakan wujud dominasi politik atas masyarakat dan negara selalu ada di atas masyarakat.⁸

Althusser membahas negara sebagai *mekanisme represi* atau *mesin represi* selalu mengacu pada kesatuan perangkat kenegaraan (*state apparatus*). Sebagai suatu kesatuan perangkat, negara tidak hanya mempunyai fungsi spesifik, tetapi juga negara mampu menciptakan fungsi umum sebagai perluasan-perluasan dari fungsi esensial yakni sebagai alat perjuangan kelas. Dalam fungsi itu, negara berdiri sebagai kekuatan intervensif dalam perjuangan kelas. Althusser mengungkapkan dengan momen-momen berikut: (1) negara identik dengan perangkat kenegaraan yang represif (*repressive state apparatus*); (2) perlu pembedaan antara kekuasaan negara dan perangkat kenegaraan (*state power and state apparatus*); (3) tujuan utama setiap perjuangan kelas adalah kekuasaan negara; perangkat kenegaraan menjadi fungsional bagi

⁸ Nezar Patria & Andi Arief, Antonio Gramsci, Negara dan Revolusi (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), 127.

⁹ FM. Suseno, Diskursus Kemasyarakatan dan Kemanusiaan: Capita Selecta (Jakarta: Gramedia, 1993).



perjuangan kelas; dan (4) untuk menghindari situasi penindasan, proletariat harus berusaha untuk merebut kekuasaan, sehingga ia mampu mengendalikan perangkat kenegaraan yang menguntungkan dan fungsional bagi mereka.

1. Negara dan Fungsionalisasi Perangkatnya

Paralel dengan marxis-orthodoks, Althusser menyatakan bahwa ada dua dimensi hakiki yakni: represif dan ideologi. Kedua dimensi ini erat kaitannya dengan eksistensi negara sebagai alat intervensi perjuangan kelas, yang satu masuk dengan cara memaksa, sedangkan yang lain masuk dengan mempengaruhi. Berawal dari analisis tersebut Althusser membedakan antara perangkat negara represif (*Repressive State Apparatus*) dan perangkat negara yang ideologis (*Ideological State Apparatus*). Keduanya disingkat RSA dan ISA. Kedua perangkat yang berbeda ini mempunyai fungsi sama yakni untuk melanggengkan penindasan yang tampak dalam relasi produksi masyarakat.

RSA dan ISA sebenarnya merupakan perangkat kenegaraan yang berkaitan erat dengan keberadaan negara sebagai alat intervensi perjuangan kelas. RSA bekerja di dalam lingkup yang bersifat fisik atau kekerasan (*violence*); berada di dalam sistem dan struktur kekuasaan negara, serta bersifat sentralistis dan sistematis, sedangkan ISA bekerja dengan melakukan manipulasi terhadap kesadaran masyarakat, serta berada di dalam ataupun di luar lingkup kekuasaan negara. Contoh RSA, misalnya institusi polisi, pengadilan dan militer, sedangkan contoh ISA misalnya institusi *pendidikan*. Adapun ISA bekerja dengan apa yang dinamakan "ideologi"⁹.

Tentang RSA, Althusser memberikan pengertian sebagai berikut; sifat kerja RSA pertamanya menindas. Penindasan yang dilakukan ini selanjutnya diberi arti ideologis (seolah-olah bernilai dan sah). RSA langsung dibawah kendali kelas penguasa yang ada dalam satu komando yang terlembagakan dengan tugas-tugas resmi. RSA bersifat sentralistis, dan sistematis. Bagi Althusser RSA identik dengan sistem dan struktur negara, yang semata-mata berdiri sebagai penyangga kekuasaan yang sah dan eksplisit. Keabsahan ini memungkinkan RSA menjangkau publik lebih luas dan gerak hidupnya bersifat politik. Contoh dari RSA ini antara lain: birokrasi, pengadilan, militer, polisi. Sedangkan tentang ISA, Althusser menerapkan prinsip-prinsip bahwa gerak hidup ISA selalu ideologis yang akan represif. Berbeda dengan RSA, ISA tidak hanya ada dalam lingkup kekuasaan, tetapi bisa jadi dimiliki sebagai sarana menuju kekuasaan kelompok diluar kekuasaan. Kenyataan tersebut tidak dapat dihindari jika terjadi perbenturan antara kelompok yang bekepentingan dengan ISA. Bentuk dari ISA antara lain seperti institusi agama, pendidikan dan sebagainya.

2. Kerjasama antara ISA dan RSA

Dimensi represif dan ideologis dalam negara mengambil bentuk dalam dua wujud, yakni RSA dan ISA. Pada dasarnya bentuk ISA bersifat personal karena jangkaunnya adalah sekitar warga masyarakat, sedangkan RSA lebih fisik sifatnya, karena RSA bertindak dalam lingkup

Mohamad Zaki Hussein, Cara Bekerjanya Ideologi Menurut Althusser. <http://rumahkiri.net>, 2007.

kekerasan (*Violence*). Bagaimana keduanya diintegrasikan dalam rangka fungsi represif negara. Dengan lingkup gerakannya yang lebih fisik dan dapat dikatakan *Violence*. RSA mengamankan kondisi politik yang diciptakan oleh ISA dengan tindak manipulasi kesadaran warga masyarakat tersebut. Justru dengan jasa RSA terhadap ISA ini, ISA dapat menyusun suatu kerangka legitimasi yang akan mengabsahkan tindakan RSA tersebut sehingga masyarakat tidak akan melawan tindakan memaksa RSA. Hal ini berlangsung terus menerus dalam mekanisme yang sama.

3. Fungsi Ideologi dalam Negara

Secara teoritis Konseptual marxis-ortodoks memang tidak mempunyai konsep-konsep tentang ideologi. Dalam *German ideology*, ideologi hanya dikatakan sebagai sistem atau representasi idea yang mendominasi kerangka kognitif kelompok individu atau kelompok sosial. Konsep ini bukan hal baru yang ditampilkan sebagai konsep tentang ideologi. Kendati kerangka konseptual marxis-ortodoks tidak memberikan sesuatu yang baru, tetapi telah memberikan sumbangan besar sekitar ideologi yang mereka munculkan. Mereka berhasil menampilkan suatu karakteristik mendasar suatu ideologi, yakni bahwa pada umumnya ideologi tidak dapat dipisahkan dari ekspresi kepentingan dan posisi kelas tertentu dalam masyarakat. Ideologi adalah cerminan atau perumusan kepentingan dan posisi kelas tertentu dalam suatu masyarakat. Sama dengan negara, ideologipun berfungsi interventif bagi perjuangan kelas, dan Althusser menuju ke sana.

Bagi Althusser, ideologi ditempatkan lebih utama daripada alat-alat produksi. Di samping itu, ideologi memiliki peran dalam menciptakan individu menjadi subyek-subyek. Individu mendapatkan status/identitas sosialnya terutama melalui upacara ideologi negara, salah satunya adalah media. Fungsi ideologi dalam pandangan Althusser adalah: (1) ideologi merupakan hubungan imajiner individu untuk kondisi keberadaan mereka; dan (2) ideologi memiliki bahan keberadaan.”

Althusser memandang ideologi sedikitnya dapat dipahami dalam lima konsep: *Pertama*, ideologi mengacu pada pelebagaan gagasan secara sistematis yang diartikulasikan oleh sekelompok masyarakat tertentu. *Kedua*, ideologi dipandang sebagai upaya *penopengan* dan penyembunyian realitas tertentu. Ia berfungsi untuk menghadirkan citra-citra tertentu yang telah diseleksi, direduksi dan didistorsi yang kemudian memproduksi, apa yang disebut Marx dan Engels sebagai “kesadaran palsu”. *Ketiga*, definisi ideologi sedikit banyaknya terkait dengan definisi kedua, yaitu ideologi terwujud/mengejewantah dalam bentuk-bentuk ideologis. *Keempat*, ideologi sebagai pelebaga ide sekaligus sebagai praktek materil. *Kelima*, ideologi yang difungsikan pada level konotasi (tersirat), makna sekunder, makna yang seringkali tidak disadari yang terdapat pada teks dan praktik kehidupan¹⁰.

Definisi ideologi yang dikemukakan oleh Roland Barthes, seorang teoritis budaya Perancis, ideologi (mitos) mengarahkan kita pada perjuangan hegemonik untuk membatasi makna konotatif, menetapkan konotasi-konotasi partikular, dan memproduksi konotasi-konotasi baru. Ideologi selalu berupa untuk menjadi apa yang faktanya partikular menjadi universal dan legitimate dan juga upaya untuk menaturalkan hal-hal yang pada dasarnya kultural. Ideologi.

¹⁰ Felagonna, 2008.



bagi Althusser, bertujuan untuk kohesi, dan mencapai tujuan ini dengan cara sosial subyek, bukan sebagai hasil dari kegiatan otonom manusia. Menurut Althusser, apapun teori ideologi berdasarkan individu atau kelas subyek tidak hanya *stek*, cenderung menjadi *essentialist* problema, keadaan mengasingkan diri, tetapi juga untuk menimbulkan efek kesalahan sejak ideologi menciptakan mata pelajaran dari mereka yang merusak atau alienates mereka dari alam atau sari.

4. Kritik Althusser atas Konsep Ideologi Marxis-Ortodoks

Pada prinsipnya Althusser menyetujui rumusan sekitar ideologi Marxis-Ortodoks, namun ia berdiri sebagai seorang strukturalis-marxis yang cenderung mensientifikasikan pemikiran Marx, ia membedakan antara ideologi dan science. Berbeda dengan science yang hanya lahir dari pemikiran manusia yang tergerak untuk menyusun suatu kerangka teoritis, ideologi dimunculkan karena adanya keinginan manusia untuk bertindak. Namun dalam tindakan-tindakannya tersebut ia membutuhkan teori yang dapat memerangnya. Konsekuensi pemikiran Althusser dapat kita lihat dalam pemikiran sekitar hakekat ideologi. Ideologi yang selalu mengacu pada tindakan, memudahkan Althusser untuk setuju dengan pemikiran marxis-ortodoks yang mengatakan bahwa ideologi itu selalu ada dalam kerangka kepentingan suatu perjuangan kelas. Namun ia juga menolak marxis-ortodoks yang mengatakan bahwa ideologi itu hanya sekedar ilusi murni yang tidak memiliki sejarah, karena itu hanya sekedar impian belaka. Penolakan ini dikatakan Althusser sebagai sikap ketidaksetujuan terhadap pernyataan paradoksal marxis-ortodoks itu.

5. Hakekat Suatu Ideologi menurut Althusser

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menanggapi penolakan ini Althusser mengajukan pemikiran baru tentang ideologi. Pemikiran Althusser lebih mendekati ideologi dari sisi yang lebih positif dan historis yaitu melihat struktur dan fungsi ideologi. Pemikiran Althusser menampilkan dua tesisnya tentang ideologi. Pertama, adanya kemungkinan bahwa ideologi mempunyai sejarah pada dirinya. Untuk mengadakan perubahan dari yang ahistoris menjadi omni-historis. Hal ini dijelaskan dengan kehadiran ideologi dalam sejarah, terutama sejarah perjuangan kelas, karena kepentingan suatu perjuangan kelas ini, si individu atau kelompok membuat suatu kerangka teori yang diangkat dari situasi riil, agar tindakan mereka benar dan sah bagi masyarakat sesuai historis mereka. Kedua, secara umum ideologi tidak mempunyai sejarah. Pada umumnya ideologi adalah ahistoris. Kata (sifat) kekal itu, secara implisit mengandung artian tidak menyejarah. Hal ini diterangkan dari sudut pemahaman historisitas modern dan pengaruh psikoanalisis. Dari pemahaman historisitas modern, sesusau itu historis jika berada dalam batas-batas waktu dan tempat. Dari Psikoanalisis, sifat kekal itu hanya dimiliki oleh struktur kepribadian yang tidak sadar

6. Isi Sebuah Ideologi

Masih menanggapi tesis marxis-ortodoks tentang ideologi, Althusser lebih berbicara tentang isi suatu ideologi, ia menampilkan dua tesis yaitu tesis negatif dan tesis positif. Dalam tesis negatif, Althusser berbicara kehadiran ideologi dalam bentuk yang imajiner



Negara, Ideologi, dan Pendidikan dalam Pandangan...

sifatnya, bahwa ideologi sebagai suatu kerangka pandang yang tidak mampu menjawab realitas. Kondisi real yang dirumuskan sebenarnya bukan kondisi real tentang eksistensinya, melainkan hanyalah kondisi real yang hanya mengacu pada relasi produksi. Berbeda dengan marxisme ortodoks, Althusser mengatakan bahwa relasi tersebut tidak hanya relasi antar kelompok (kelas) tetapi juga individu yang terlibat dalam relasi produksi. Berbeda dengan Marxisme ortodoks, Althusser tidak mengatakan bahwa ideologi merupakan sistem relasi, namun sebenarnya hanyalah imajinasi tentang suatu relasi. Ideologi disusun oleh pihak-pihak yang teralienasi dengan dunia yang nyata dan mereka mencoba untuk mengatasinya (kelompok proletariat) atau justru mempertahankannya (kelompok penguasa).

Untuk tesis positif, Althusser mengatakan bahwa ideologi selalu memiliki eksistensi material. Tesis positif dapat dikatakan sebagai tesis tentang ideologi yang dipahami sebagai sistem representasi. Karena tindakan tampak secara fisik, tindakan tersebut dapat dikatakan sebagai sifat material individu, atau eksistensi material individu. Dari sinilah Althusser menyimpulkan bahwa materi itu tampak.

7. Subyek dalam Suatu Ideologi

Pemikiran ini sebenarnya merupakan kelanjutan dari tesis positif tentang isi ideologi yang berbicara sekitar tindakan sebagai sifat material ideologi. Althusser mengemukakan bahwa selama tindakan tersebut dilaksanakan individu, dirinya selalu merasa sebagai obyek yang bebas dari tindakannya, sebagai ungkapan ideologi yang ada dalam dirinya. Ada dua hal sehubungan dengannya yaitu: 1) Bahwa tidak ada tindakan yang terlepas dari ideologi, dan 2) Tidak ada ideologi yang terlepas dari ideologi lain.

Dari pemikiran tersebut, ada keterkaitan erat antara ideologi dengan subyek. Ideologi memerlukan subyek, dan subyek memerlukan ideologi. Ideologi bukanlah hasil rumusan semua individu atau kelompok yang ada dalam masyarakat. Mereka adalah hasil rumusan dari kelompok (individu-individu tertentu) yang ada dalam masyarakat.

Keterkaitan Logika Antonio Gramsci dengan Louis Althusser

Logika hegemoni Antonio Gramsci akan lebih terjelaskan dengan meminjam pisau analisis Louis Althusser. Di mana Althusser mempertegas bahwa, tak satu pun kelas yang mampu memegang kuasa negara dalam periode yang lama tanpa sekaligus menjalankan hegemoninya di sekeliling dan di dalam aparatus negara ideologis.¹¹ Hegemoni berjalan melalui logika *Ideological State Apparatuses* (ISA) dan *Repressive State Apparatus* (RSA).

Menurut Althusser,¹² bahwa aparatur Negara Ideologis bekerja secara masif dan berkuasa lewat ideologi; tapi berfungsi secara sekunder melalui represi pula, bahkan dalam tingkatan tertinggi —tapi pada akhirnya— fungsi ini menjelma sangat halus dan tersembunyi, bahkan simbolik. Artinya, tidak ada satu pun aparatus yang sepenuhnya ideologis, atau represif. Semuanya berfungsi secara timbal-balik dan tumpang-tindih. Seperti aparatus negara represif.

¹¹ Louis Althusser, *Ideologi: Marxisme Strukturalis, Psikoanalisis, Cultural Studies* (Yogyakarta: Jalasutra, 2004), 23.

¹² *Ibid.*, 22.



di samping berfungsi secara masif dan berkuasa melalui represi (termasuk represi fisik), sementara secara sekunder berfungsi melalui ideologi. Secara tegas, Althusser¹³ memberikan contoh represi administrasi yang barangkali mengambil bentuk-bentuk non-fisis.

Bentuk-bentuk aparatur Negara Ideologis dapat terlihat pada: ISA Agama (gereja, rumah ibadah dan sebagainya), ISA Pendidikan (sekolah, universitas dan sebagainya), ISA Keluarga, ISA Hukum, ISA Politik (pelbagai partai, sistem politik dan sebagainya), ISA Serikat Buruh, ISA Komunikasi (pers, radio, televisi dan sebagainya), dan terakhir ISA Budaya (kesusastraan, seni, olahraga dan sebagainya). Sedangkan aparatur Negara Represif terlihat pada: pemerintah, administrasi (dengan menetapkan deadline tanggal tertentu untuk menaati ketentuan pemerintah), angkatan bersenjata, polisi, pengadilan, penjara, dan sebagainya.

Pendidikan dalam Kacamata Antonio Gramsci dan Louis Althusser

Gramsci melihat pendidikan sebagai salah satu alat organisir bagi hegemoni. Hegemoni bisa diciptakan melalui pendidikan, melalui pendidikan inilah resistensi rakyat terhadap kelompok dominan dapat diminimalisir. Bagi Gramsci titik tolak pembangunan Hegemoni adalah konsensus, penerimaan konsensus ini bagi proletariat dilakukan dengan persetujuan dan kesadaran.

Namun menurut Antonio Gramsci, pendidikan yang ada tidak pernah menyediakan kemungkinan membangkitkan kemampuan untuk berpikir secara kritis dan sistematis bagi kaum buruh, pegawai, serta masyarakat pada umumnya. Pendidikan belum dapat menumbuhkan kesadaran yang sesungguhnya ("kesadaran palsu"), yakni kesadaran yang berbasis kreatifitas, sehingga bisa membebaskan dirinya dari belenggu kekuasaan (hegemoni). Konsensus-konsensus yang ditakukan oleh buruh dengan majikan, siswa dengan gurat, pegawai dengan kepala, rakyat dengan pemerintah, masyarakat dengan negara belum berlandaskan pada persetujuan dan kesadaran yang sesungguhnya. Karena dalam pandangan Antonio Gramsci pendidikan ternyata menjadi alat hegemoni bagi para penguasa.

Di lain pihak, mekanisme kelembagaan pendidikan (sekolah) menjadi "tangan-tangan" kelompok yang berkuasa untuk menentukan ideologi yang mendominir. Bahasa menjadi sarana penting untuk melayani fungsi hegemonis. Konflik sosial yang ada dibatasi baik intensitas maupun ruang lingkupnya, karena ideologi yang ada membentuk keinginan-keinginan, nilai-nilai dan harapan menurut sistem yang telah ditentukan.¹⁴

Louis Althusser juga melihat, dalam masyarakat modern, pendidikan merupakan perangkat negara yang ideologis (*Ideological State Apparatus*) yang paling efektif untuk melaksanakan fungsi negara. Kecenderungan orang menolak setiap bentuk tindakan yang violatif dari RSA, di beberapa negara yang anti militerisme memaksa para penguasa untuk mengefektifkan bidang ISA ini dengan mengendalikan sedemikian rupa melalui lembaga pendidikan yang ada. Hal itu biasanya dimulai dalam masa dini kehidupan warga masyarakat, sehingga pada masa sekarang orang cenderung mengatakan bahwa pendidikan merupakan agama baru (ideologi baru). Pendidikan dibentuk oleh negara, para penguasa, yang pada hakekatnya juga digunakan oleh perangkat negara represif (*Repressive State Apparatus*) untuk melanggengkan kekuasaannya.

¹³ Ibid. 19.

¹⁴ Nezar Patria & Andi Arief, Antonio Gramsci, h. 127.

SIMPULAN

Antonio Gramsci dan Louis Althusser keduanya menyatakan negara merupakan institusi kekuasaan, ideologi dan pendidikan sebagai alat kekuasaan. Bedanya, Gramsci melihat penguasaan negara melalui "hegemoni", yakni penundukan melalui ide, nilai, pemikiran, dan sebagainya. Sedangkan Althusser melihat penguasaan negara melalui mekanisme "represif" dan "ideologis". Hubungan keduanya bisa dilihat pada cara kerja RCA dan ISA sebagaimana yang dikemukakan oleh Althusser. Hegemoni berjalan melalui logika *Ideological State Apparatuses (ISA)* dan *Repressive State Apparatus (RSA)*. Gramsci melihat pendidikan sebagai salah satu alat organisir bagi hegemoni. demikian halnya Althusser melihat pendidikan sebagai perangkat negara yang ideologis (*Ideological State Apparatus*) yang paling efektif untuk melaksanakan fungsi negara.

DAFTAR RUJUKAN

- Althusser, Louis. 2004. *Ideologi: Marxisme Strukturalis, Psikoanalisis, Cultural Studies*. Yogyakarta: Jalasutra.
- Fakih, Mansour. 2002. *Jalan Lain: Manifesto Intelektual Organik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hussein, Mohamad Zaki. 2007. *Cara Bekerjanya Ideologi Menurut Althusser*. <http://rumahkiri.net>.
- Patria, Nezar & Andi Arief. 1999. *Antonio Gramsci, Negara dan Revolusi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ritzer, George & Douglas J. Goodman. 2008. *Teori Sosiologi dari Teori Sosiologi Klasik sampai perkembangan Mutakhir Teori Sosial Postmoderen*, ter. Nurhadi. Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Simon, Roger. 2000. *Gagasan-gagasan Politik Gramsci*. Yogyakarta: INSIST bekerjasama dengan Pustaka Pelajar.
- Sugiono, Muhadi. 1999. *Kritik Antonio Gramsci Terhadap Pembangunan Dunia-Ketiga*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Suseno, FM. 1993. *Diskursus Kemasyarakatan dan Kemamusiaan: Capita Selecta*. Jakarta: Gramedia.